

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan *good governance* dan *clean government* merupakan prasyarat bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk melaksanakan dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mempertanggungjawabkan anggaran tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara tepat guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Beranjak dari hal tersebut penegasan pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah (SKPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang dirumuskan sebelumnya yang disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Pelaporan yang disajikan ini merupakan upaya SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu prasyarat untuk mempertanggungjawabkan anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2017

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 ini didasarkan kepada :

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025
11. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang petunjuk Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/XII/2004 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan TA 2017 dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran

serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017

Adapun tujuan penyusunan LAKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, serta meningkatkan kinerja SKPD dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 disusun melalui alur logika sistematis untuk mudah dipahami dan dicermati, dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penulisan
- E. Tugas dan wewenang Organisasi
- F. Susunan Organisasi
- G. Pegawai

BAB II : RENCANA STRATEGIS

- A. Visi
- B. Misi
- C. Tujuan dan Sasaran
- D. Kebijakan dan Program

- E. Rencana Kinerja Tahunan 2017
- F. Penetapan Kinerja 2017

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Indikator Kinerja
- B. Metodologi Pengukuran Kinerja
- C. Analisis Pencapaian Kinerja
- D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV : PENUTUP

Lampiran-Lampiran

E. TUGAS DAN WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, ditetapkan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana teknis daerah di Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi mempunyai tugas mempersiapkan, menyusun dan merumuskan kebijakan dan melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan.

3. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengembangan pendidikan dan Kebudayaan.

- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

F. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan Walikota Kota Bukittinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang-Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Formal membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan penilaian
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 3. Seksi peserta didik dan pembagunan karakter.
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan karakter.
 - c. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Peningkatan Mutu Pendidikan membawahi :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 2. Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan

3. Seksi Pendataan dan Teknologi Informasi
- d. Bidang Kebudayaan membawahi :
 1. Seksi Permuseuman
 2. Seksi Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah
 3. Seksi Bina Seni dan Nilai Tradisi
 4. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
 5. Kelompok Jabatan Fungsional

G. PEGAWAI

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan jenis kepegawaian terdiri dari jenjang struktural dan fungsional sebanyak 86 orang. Tenaga fungsional terdiri dari pengawas sekolah mulai dari pengawas TK, SD, SMP dan penilik Pendidikan Luar Sekolah dengan latar belakang pendidikan yang beragam.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga didukung dengan berbagai perlengkapan seperti gedung kantor, gedung sekolah, gedung UPTD beserta kelengkapannya. Tabel dibawah ini menggambarkan kondisi pegawai dan perlengkapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Tabel 1. Keadaan Pegawai (PNS) menurut jenjang pendidikan Tahun 2017

No	Pendidikan Formal	Jumlah (orang)	Keterangan
1	S 3	-	
2	S 2	18	
3	S 1	38	
4	D I, D II, D III	10	
5	SLTA	19	
6	SLTP	-	
7	SD	1	
JUMLAH		86	

Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat Golongan dan Ruang	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Gol I	1	
2	Gol II	18	
3	Gol III	35	
4	Gol IV	32	
JUMLAH		86	

Tabel 3. Keadaan Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan latihan Penjurangan

No	Diklat yang Diikuti	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Diklat PIM II	1	
2	Diklat PIM III	6	
3	Diklat PIM IV	9	
JUMLAH		16	

BAB II
RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Penetapan visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 merupakan keberlanjutan dari pembangunan lima tahun yang lalu yang mengarah kepada perwujudan masyarakat yang terdidik, berkualitas dan berakhlak mulia. Visi pembangunan pendidikan di Kota Bukittinggi pada tahun 2016-2021 merupakan penyempurnaan dari visi sebelumnya sekaligus mengharmonisasikan visi yang sesuai dengan arah pembangunan pendidikan Nasional. Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan selama lima tahun ke depan, akan diperoleh arah dan fokus strategi pembangunan yang jelas, langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan pendidikan jelas, target yang ditetapkan beserta indikator dapat diukur hasilnya, serta dapat mengintegrasikan program dan kegiatan yang menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi serta menjadi akselerator kegiatan secara Komprehensif.

Adapun visi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 adalah : ” Mewujudkan Pelayanan Pendidikan Dan Kebudayaan Yang Berkarakter Berlandaskan Nilai Agama Dan Budaya”.

B. MISI

Untuk mencapai visi diatas, maka ditetapkan beberapa misi untuk mengoptimalkan pencapaian visi tersebut, antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Disdikbud
3. Terwujudnya Pelestarian Warisan Budaya

C. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai upaya mengoptimalkan pernyataan 3 (tiga) misi di atas, ditetapkan tujuan yang ingin dicapai dari masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Tujuan : Meningkatnya harapan lama sekolah

Sasaran1 : Meningkatnya kualitas layanan pendidikan

Indikator : 1. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A

(memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)

2. APK SD

3. APK SMP

4. APM SD

5. APM SMP

6. APM PAUD

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pendidikan

Indikator : 1. Rata rata nilai US SD

2. Rata rata nilai UN SMP

3. Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional

4. Rata rata lama sekolah

Misi 2 : Terwujudnya Pelestarian Warisan Budaya

Tujuan : Mewujudkan Bukittinggi sebagai kota Pusaka

Sasaran 1 : Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya

Indikator : 1. Jumlah pelestarian warisan budaya Benda

2. Jumlah pelestarian warisan budaya Tak Benda

Sasaran 2 : Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya

Indikator : 1. Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya benda

2. Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya tak benda

Misi 3 : Penigkatan Kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Disdikbud

Tujuan :Peningkatan kulaitas penyelenggaraan reformasi birokrasi
Disdikbud

Sasaran : Peningkatan kualitas Penyelenggaraan SAKIP Disdikbud

Indikator : Nilai Sakip Disdikbud

Tabel : 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)
		APK SD
		APK SMP
		APM SD
		APM SMP
		APK PAUD
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata rata nilai US SD
		Rata rata nilai UN SMP
		Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional
		Rata rata lama sekolah
3	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah pelestarian warisan budaya Benda
		Juumlah pelestarian warisan budaya Tak Benda
4	Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya	Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya benda
		Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya tak benda
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP Disdikbud	Nilai Sakip Disdikbud

D. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. Kebijakan

Arah kebijakan Walikota Bukittinggi periode 2016-2021 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 Khusus bidang pendidikan ditetapkan bahwa tujuan pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas secara merata dan berkeadilan. Untuk mengukur keberhasilan/capaian tujuan pembangunan urusan pendidikan tersebut, dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Tingkat Kelulusan pada Seleksi/Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan lain-lain. Adapun kebijakan yang telah dituangkan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
 - a. Memberikan bantuan dana insentif / Kesejahteraan
 - b. Memberikan bantuan dana operasional
 - c. Pemberian bantuan rintisan berdirinya lembaga PAUD
 - d. Pemberian bantuan operasional dan sarana prasarana pendidikan
 - e. Peningkatan Pelayanan Satuan PAUD Formal oleh pemerintah
 - f. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan PAUD Formal
 - g. Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA kriteria umur tergantung dalam Buku Pedoman USB
 - h. Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA dan SD/MI diberikan ketentuan umur minimal
2. Bidang Pendidikan Dasar
 - a. Regrouping untuk Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan,
 - b. Peningkatan input dan Pelayanan Pendidikan

- c. Regulasi Penerimaan Peserta Didik baru SD
 - d. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Kelompok Kerja Guru dan Pelatihan
 - e. Menyelenggarakan sekolah inklusif
 - f. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
 - g. Peningkatan dan Penambahan Sumber belajar siswa
 - h. Peningkatan Mutu Pendidikan dan daya saing
 - i. Peningkatan Mutu Pengelolaan Kelompok Belajar Masyarakat di sekolah
 - j. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya Pendidikan
 - k. Peningkatan Mutu Pendidikan dan daya saing
 - l. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan
3. Bidang Pendidikan Luar Sekolah :
- a. Peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah melalui pemberantasan buta aksara.
 - b. Pembebasan biaya pendidikan
 - c. Standar instrumen akreditasi
 - d. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan
 - e. Peningkatan pelayanan Pendidikan Non Formal
 - f. Peningkatan budaya baca masyarakat
 - g. Memberikan bantuan dana pelaksanaan dan peralatan
 - h. Memberikan pelatihan tenaga PNF
 - i. Mengadakan koordinasi antar Forum PNF
5. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan
- a. Fasilitasi terhadap pendidik dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi.
 - b. Fasilitasi pengelolaan pendidikan (e-learning, e-education maupun eadministration) berbasis IT
 - c. Pemberian reward and punishment.

- d. Fasilitasi kualifikasi penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan)

6. Bidang Kebudayaan

- a. Seleksi Pembinaan dan pengiriman peserta pada even seni Sumbar
- b. Pembinaan terhadap organisasi adat dan manajemen kepengurusannya.
- c. Mengadakan pelatihan dan memberikan pembekalan adat istiadat kepada kelompok-kelompok adat
- d. Mengadakan pelatihan dan memberikan pembekalan kesenian kepada kelompok seni di Kota Bukittinggi

2. Program

Pada tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 14 Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pendidikan Anak Usia Dini
6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
7. Program Pendidikan Non Formal
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Program Manajemen Pelayanan
10. Program BOS
11. Program Pengembangan Nilai Budaya
12. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
13. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
14. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance plan*) Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017. Target Kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *Bench Mark* dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi.

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang berisikan semua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui penandatanganan bersama antara seluruh Kepala SKPD dengan Walikota Bukittinggi.

F. PENETAPAN KINERJA 2017

Penetapan Kinerja (TAPKIN) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Tahun 2017 berisikan sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan dan dana. Kegiatan dan dana sudah dituangkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017 yang sudah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan . Adapun muatan dalam TAPKIN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel : 5 TAPKIN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGAET
1	2	3	4

1	Meningkatnya kualitas layanan pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	80%
		APK SD	100%
		APK SMP	100%
		APM SD	100%
		APM SMP	100%
		APK PAUD	86,50%
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata rata nilai US SD	8,50
		Rata rata nilai UN SMP	61,84
		Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional	100
		Rata rata lama sekolah	10,87
3	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah pelestarian warisan budaya Benda	27
		Juamlah pelestarian warisan budaya Tak Benda	22
4	Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya	Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya benda	22
		Jumlah apresiasi terhadap warisan budaya tak benda	22
5	Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP Disdikbud	Nilai Sakip Disdikbud	CC

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja yang telah dikerjakan selama tahun anggaran 2017 berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya dan analisis akuntabilitas sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan Pendidikan adalah :

1. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 standar pendidikan Nasional) dari target tahun 2017 80 % , target ini sudah tercapai karena sekolah di Kota Bukittinggi yang

- akreditasi C hanya 3 sekolah, itupun sekolah yang baru berdiri .
2. APK SD, APK SMP, APM SD, APM SMP serta APK Paud di Kota Bukittinggi capaiannya sudah melebihi 100 %.
 3. Untuk rata-rata nilai US SD dan UN SMP tahun 2017 mengalami penurunan, dimana nilai tahun 2016 rendah dari tahun 2017 yang mencapai rata rata 7,00 dan 2017 nilainya 61,84 untuk SMP sedangkan SD mengalami kenaikan dari 7,4 menjadi 8,5.
 4. Untuk prestasi yang pada tahun 2017 Dinas Pendidikan mendapat juara aik di tingkat Propinsi ataupun Nasional diantaranya guru dan pengawas berprestasi mendapat juara tingkat Nasional.
 5. Dalam bidang kebudayaan, pelestarian benda cagar budaya sedang diadakan pelestariannya baik benda cagar budaya berupa benda ataupun tak benda.

B. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan

dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

C. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan analisis terhadap pelaksanaan program kegiatan berdasarkan fungsi dan sub fungsi yang termuat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bukittinggi.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu SKPD yang mengelola anggaran APBD terbesar, hal ini disebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola banyak sumber daya yang berada dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SPNF SKB, dan sekolah. Terdapat 177 kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, dengan sumber dana murni dari APBD maupun dana dari pusat dan provinsi. Adapun Anggaran yang dikelola tahun 2017 sebesar Rp. **148.193.958.465** ,- terealisasi sebesar Rp **121.134.276.753** (82%) yang terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) sebanyak Rp. **108.085.163.503,-** realisasi sebesar Rp. **100.798.339.794,-** (93%) sisa sebesar Rp. **7.286.823.709,-** dan belanja langsung sebesar Rp. **40.108.794.962,-** terealisasi sebesar Rp. **20.335.936.959,-** **sisa sebesar Rp. 19.772.858.003,-** (51%) . Realisasi 93% tersebut disebabkan oleh target belanja DAK 100%, yang terdiri dari DAK fisik dan DAK Non Fisik serta sisa DAK 2010-2014 dan sisa DAK 2015 hanya terealisasi 55%. Dan Program Kegiatan Bos SD dan SMP Kota Bukittinggi belum terealisasi, sedangkan kegiatan dan transfer dana ke sekolah sudah mencapai 100% namun laporan realisasinya belum bisa masuk aplikasi laporan keuangan secara keseluruhan. Sementara realisasi belanja langsung tanpa DAK adalah sebesar 86 %. Data tersebut menggambarkan bahwa realisasi dana DAK sangat mempengaruhi

realisasi kinerja belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Secara detail rincian sebagai berikut:

- a. Belanja langsung tanpa DAK dan BOS sebesar Rp. 20.243.704.312,-
Realisasi sebesar Rp. 18.345.081.639 ,- sisa sebesar Rp. 1.898.622.673,- (90,62%)
- b. Belanja langsung DAK sebesar Rp. 3.632.233.940 ,- Realisasi sebesar Rp 1.990.855.320 ,- sisa sebesar Rp. 1.641.378.620,- (55 %)
- c. Belanja Langsung Kegiatan BOS sebesar Rp. 16.232.856.710,-
Sisa sebesar Rp. 16.232.856.710,- (0 %)

Belanja tersebut di atas adalah untuk menjalankan 14 program yang memuat 177 kegiatan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Disdikbud, UPTD SKB dan sekolah negeri jenjang SD, SLP. Seluruh kegiatan yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2017 sementara kegiatan yang sumber dana yang berasal dari arahan pusat seperti DAK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis disamping aturan lain yang relevan.

Semua program dan kegiatan yang telah disusun secara skala prioritas telah dapat dilaksanakan sesuai aturan. Program, kegiatan, anggaran dan realisasi serta persentase realisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TA 2017 dituangkan dalam format capaian kinerja kegiatan sebagai berikut:

Tabel : 7 Capaian Kinerja Kegiatan

NO	SUMBER DANA	PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	% REALISASI

I	APBD Pemerintahan Kota Bukittinggi (APBD + DAK)	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.102.938.011	1.014.485.524	92 %
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.999.000,00	14.389.000	96 %
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000,00	50.284.190	67 %
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	138.500.000,00	100.341.950	72 %
		4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	94.999.620,00	94.773.900	100 %
		5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	19.955.000	100 %
		6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	69.850.000,00	69.681.000	100 %
		7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	16.999.800	100 %
		8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.948.800	99 %
		9	Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000,00	33.777.000	68 %
		10	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi	277.195.167,00	269.372.423	97 %
		11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	75.394.224,00	75.254.856	100 %
		12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	140.000.000,00	139.989.605	100 %
	13	Pelaksanaan Proses administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	120.000.000,00	119.718.000	100 %	
II		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		111.000.000,00	110.374.900,00	99 %
		14	Pengadaan Perlengkapan Kantor	41.000.000,00	40.543.000	99 %
		15	Pengadaan Peralatan Kantor	40.000.000,00	39.994.900	100 %
		16	Pembangunan Pagar Pengamanan Kantor	30.000.000,00	29.837.000	99 %
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		284.257.110,00	251.189.010,00	88 %
		17	Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	133.885.000,00	117.389.500	88 %

		18	Workshop Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	54.221.110,00	54.221.110	100 %
		19	Pembekalan dan Penerbitan Pembuatan Jurnal Guru dan Pengawas Sekolah	96.151.000,00	79.578.400	83 %
IV		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		53.128.360,00	45.039.200,00	8.089.160,00
		20	Penyusunan laporan keuangan semesteran	8.082.000,00	7.942.950	139.050
		21	Penyusunan Rencana Kerja dan keuangan SKPD	9.997.510,00	9.771.250	226.260
		22	Peningkatan Manajemen, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bansos dan Hibah	15.197.000,00	13.025.500	2.171.500
		23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.999.850,00	4.574.500	425.350
		24	Penyusunan Laporan LPPD	4.983.500,00	4.824.500	159.000
		25	Penyusunan LKPJ	4.983.500,00	4.900.500	83.000
		26	Penyusunan Pelaporan Digital	4.885.000,00		4.885.000
V		Program Pendidikan Anak Usia Dini		476.838.400,00	457.016.564,00	96 %
		27	Penyelenggaraan TK N Pembina	27.916.000,00	27.475.114	98 %
		28	Penyelenggaraan PAUD, Kelompok Bermain dan TK "Harapan Bunda"	58.070.000,00	58.070.000	100 %
		29	Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN)	39.532.900,00	36.887.900	93 %
		30	Jambore Pendidik PAUD	30.041.300,00	29.568.800	98 %
		31	Reward PAUDNI Berprestasi (Tingkat Provinsi dan Nasional)	75.000.000,00	63.000.000	84 %
		32	Pelaksanaan Apresiasi PTK PAUDNI	62.004.500,00	62.004.500	100 %
		33	Pengelolaan Izin Operasional Paudni, PKBM, LKP	11.480.950,00	11.268.000	98 %
		34	Penunjang akreditasi PAUD DIKMAS	33.936.950,00	33.936.950	100 %
		35	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	49.455.800,00	48.405.300	98 %
		36	Operasional Penyelenggaraan PAUD - KB Harapan Bunda Binaan	12.000.000,00	12.000.000	100 %

			UPTD SKB (DAK Non Fisik 2017)			
		37	Operasional Penyelenggaraan PAUD - TK Harapa Bunda Binaan UPTD SKB (DAK Non Fisik 2017)	16.200.000,00	16.200.000	100 %
		38	Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri - TK Pembina (DAK Non Fisik 2017)	61.200.000,00	58.200.000	95 %
VI		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		13.661.568.221,00	11.107.847.800,00	81 %
		39	Penyelenggaraan Ujian Nasional SLTP	38.710.000,00	35.547.000	92 %
		40	Olimpiade Sains Nasional Jenjang SLTP	73.375.000,00	62.341.500	85 %
		41	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah	49.464.000,00	49.314.800	100 %
		42	Pelaksanaan O2SN dan Pengiriman atlit ke Tingkat Propinsi dan Nasional	285.057.750,00	186.524.232	65 %
		43	Penyelenggaraan UAS SD / MI / SDLB	150.000.000,00	146.863.000	98 %
		44	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SD/MI/SDLB	119.999.900,00	119.069.900	99 %
		45	Olimpiade SD / MI	129.999.900,00	82.724.900	64 %
		46	Pembinaan dan seleksi OSN Guru SD	72.080.000,00	66.389.400	92 %
		47	Pembinaan dan Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Jenjang TK,SD,SLTP dan SLTA	278.910.000,00	233.403.700	84 %
		48	Penunjang Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Kota Bukittinggi	43.820.000,00	43.820.000	100 %
		49	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SD	23.720.000,00	23.720.000	100 %
		50	Penyelenggaraan SMP N 1 Bukittinggi	97.107.336,00	92.840.612	96 %
		51	Penyelenggaraan SMP N 2 Bukittinggi	115.714.686,00	112.821.275	97 %
		52	Penyelenggaraan SMP N 3 Bukittinggi	64.036.436,00	57.081.000	89 %
		53	Penyelenggaraan SMP N 4 Bukittinggi	103.075.738,00	98.691.000	96 %
		54	Penyelenggaraan SMP N 5 Bukittinggi	79.576.198,00	77.590.073	98 %
		55	Penyelenggaraan SMP N 6 Bukittinggi	67.704.654,00	67.345.600	99 %
		56	Penyelenggaraan SMP N 7 Bukittinggi	44.874.978,00	41.618.221	93 %
		57	Penyelenggaraan SMP N 8	53.979.000,00		96 %

			Bukittinggi		52.076.697	
		58	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Campago Ipuh	20.930.000,00	19.770.000	94 %
		59	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	43.825.400,00	42.509.400	97 %
		60	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pulai Anak Air	22.541.300,00	22.538.000	100 %
		61	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Garegeh	85.873.000,00	76.460.000	89 %
		62	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	29.079.176,00	29.079.000	100 %
		63	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Pulai Anak Air	94.050.000,00	66.924.000	71 %
		64	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	24.144.200,00	24.144.200	100 %
		65	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Campago Ipuh	16.425.000,00	16.425.000	100 %
		66	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Manggis Ganting	20.562.800,00	20.562.800	100 %
		67	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	18.003.700,00	18.003.700	100 %
		68	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	19.658.794,00	19.265.000	98 %
		69	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	18.790.248,00	18.790.000	100 %
		70	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	18.235.000,00	18.235.000	100 %
		71	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Tanjung Alam	20.665.199,00	20.615.150	100 %
		72	Penyelenggaraan SD Negeri 15 Pulai Anak Air	23.430.858,00	22.805.750	97 %
		73	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Campago Ipuh	21.871.712,00	21.860.000	100 %
		74	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Manggis Ganting	20.331.143,00	20.330.000	100 %
		75	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	21.671.572,00	21.360.000	99 %
		76	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	36.230.453,00	36.201.500	100 %
		77	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Percontohan	97.229.000,00	96.536.000	99 %
		78	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Kurai	68.919.000,00	67.570.667	98 %
		79	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	24.441.826,00	24.441.800	100 %
		80	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Tarok Dipo	21.058.245,00	21.031.800	100 %
		81	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tengah Sawah	21.044.000,00	20.963.000	100 %
		82	Penyelenggaraan SD	84.237.002,00		99 %

			Negeri 07 Bukit Cangang		83.539.000	
		83	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Tarok Dipo	30.343.049,00	30.171.498	99 %
		84	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Aur Tajung Tangah Sawah	20.056.000,00	19.557.000	98 %
		85	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	18.013.283,00	18.000.000	100 %
		86	Penyelenggaraan SD Negeri 12 Bukit Cangang	67.542.671,00	66.670.000	99 %
		87	Penyelenggaraan SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	16.451.856,00	16.451.000	100 %
		88	Penyelenggaraan SD Negeri 14 Aur Tajung Tangah Sawah	31.690.000,00	31.690.000	100 %
		89	Penyelenggaraan SD Negeri 16 Tarok Dipo	36.261.871,00	35.570.000	98 %
		90	Penyelenggaraan SD Negeri 17 Pakan Kurai	40.400.000,00	39.500.500	98 %
		91	Penyelenggaraan SD Negeri 18 Tarok Dipo	19.310.000,00	19.240.000	100 %
		92	Penyelenggaraan SD Negeri 19 Aur Tajung Tangah Sawah	19.025.196,00	18.925.100	99 %
		93	Penyelenggaraan SD Negeri 01 Ladang Cangkih	18.956.136,00	18.173.000	96 %
		94	Penyelenggaraan SD Negeri 02 Aur Kuning	21.717.883,00	20.952.550	96 %
		95	Penyelenggaraan SD Negeri 03 Pakan Labuah	29.230.000,00	29.016.950	99 %
		96	Penyelenggaraan SD Negeri 04 Birugo	97.639.007,00	96.568.000	99 %
		97	Penyelenggaraan SD Negeri 05 Birugo	24.428.000,00	22.686.000	93 %
		98	Penyelenggaraan SD Negeri 06 Parit Antang	20.288.045,00	20.288.000	100 %
		99	Penyelenggaraan SD Negeri 07 Belakang Balok	25.394.456,00	25.394.000	100 %
		100	Penyelenggaraan SD Negeri 08 Kubu Tanjung	20.326.254,00	20.286.000	100 %
		101	Penyelenggaraan SD Negeri 09 Belakang Balok	77.128.614,00	74.880.000	97 %
		102	Penyelenggaraan SD Negeri 10 Sapiran	29.523.715,00	25.829.000	87 %
		103	Penyelenggaraan SD Negeri 11 Aur Kuning	74.203.391,00	73.488.300	99 %
		104	Operasional DAK SD	62.258.700,00	58.348.981	94 %
		105	DAK SD / SDLB Tahun 2017	678.000.000,00	199.712.000	29 %
		106	DAK SMP/SMPLB Tahun 2017	1.142.000.000,00		0 %
		107	DAK Bidang Pendidikan (Sisa DAK 2010-2015)	1.722.833.940,00	1.704.743.320	99 %
		108	Lanjutan Pembangunan RKB SD Kota Bukittinggi (DID)	909.650.000,00	855.244.000	94 %
		109	Pekerjaan Rehab Pagar Sekolah SD Kota Bukittinggi (DID)	132.726.450,00	132.119.000	100 %

		110	Pembangunan Rehabilitasi SD Kota Bukittinggi (DID)	264.985.000,00	263.993.000	100 %
		111	Pekerjaan Rehab Wc / Jamban SD Kota Bukittinggi (DID)	237.300.000,00	185.495.000	78 %
		112	Pengadaan Komputer Untuk Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT (DID)	973.000.000,00	965.740.000	99 %
		113	Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 7 Bukittinggi (DID)	1.000.000.000,00	940.094.200	94 %
		114	Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 8 Bukittinggi (DID)	850.000.000,00	764.056.200	90 %
		115	Lanjutan Pembangunan RKB SMPN 6 Bukittinggi (DID)	103.100.000,00	102.691.000	100 %
		116	Rehab WC SMP Negeri Kota Bukittinggi (DID)	224.365.000,00	223.071.000	99 %
		117	Operasional DAK SMP	32.744.000,00	27.820.774	85 %
		118	Pesantren Pelajar SMP Kota Bukittinggi	186.479.900,00	181.439.900	97 %
		119	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa dan Sekolah yang Meraih Nilai UN Terbaik	57.485.000,00	43.185.000	75 %
		120	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N SMP)	159.180.000,00	100.385.100	63 %
		121	Penunjang Operasional Teknis Pelaksanaan Beasiswa Miskin SLTP/SLTA	33.833.600,00	33.830.600	100 %
		122	Bimtek Karya Tulis Guru SLTP	50.865.000,00	47.083.000	93 %
		123	Studi Kelayakan Izin Operasional Sekolah	37.948.000,00	37.898.000	100 %
		124	Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja	45.735.000,00	39.184.800	86 %
		125	Gebyar Expo pendidikan	24.600.000,00	24.600.000	100 %
		126	Penerimaan Peserta Didik Baru	37.640.000,00	36.040.000	96 %
		127	Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa Berbasis Aqidah Pada Semua Jenjang Pendidikan	102.455.000,00	101.917.000	99 %
		128	Reward Siswa Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	30.000.000,00	30.000.000	100 %
		129	Pengadaan Komputer dan Server Untuk Ujian Nasional Bebas Komputer (UNBK) dengan Sistem CBT (DID)	950.000.000,00	714.856.150	75 %
		130	Perencanaan Bangunan Tempat Pendidikan	90.000.000,00	71.219.200	79 %
VII		Program Pendidikan Non Formal		419.495.805,00	396.647.264,00	95 %
		131	Apresiasi LKP Berprestasi	48.450.500,00	33.089.158	68 %

		132	Penunjang Operasional Kelompok Kerja Penilik Luar Sekolah	14.159.905,00	13.795.155	97 %
		133	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket C Setara SMA	37.500.000,00	37.500.000	100 %
		134	Peningkatan Kompetensi Warga Belajar Paket C (Paket C Vokasional)	81.088.000,00	81.088.000	100 %
		135	Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C Periode I dan II	49.934.400,00	49.814.400	100 %
		136	Penyelenggaraan UPTD SKB Kota Bukittinggi	55.982.000,00	49.413.781	88 %
		137	Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket B Setara SMP	33.250.000,00	33.250.000	100 %
		138	Penunjang operasional BOP	32.494.000,00	32.059.770	99 %
		139	Orientasi program PAUD	40.597.000,00	40.597.000	100 %
		140	Operasional Kegiatan / Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Paket A Setara SD	16.040.000,00	16.040.000	100 %
		141	Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (ATS) Tahun 2017	10.000.000,00	10.000.000	100 %
VIII		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		5.062.518.535,00	4.898.728.950,00	97 %
		142	Pelaksanaan Sertifikasi Guru dan UKG	54.353.000,00	48.170.850	89 %
		143	Pemeriksaan Berkas TPG dan Aneka Tunjangan	89.890.000,00	85.005.100	95 %
		144	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS	4.803.825.000,00	4.664.175.000	97 %
		145	Pelaksanaan Akreditasi Sekolah	67.127.435,00	60.615.700	90 %
		146	Kajian dan Analisis Mutu Pengelolaan 8 Standar Pendidikan	47.323.100,00	40.762.300	86 %
IX		Program Manajemen Pelayanan		1.026.862.700,00	846.836.427,00	82 %
		147	Penunjang Operasional Tim Koordinasi BOS	106.217.600,00	97.595.350	92 %
		148	Pengelolaan Website Disdikpora Kota Bukittinggi	47.285.000,00	43.835.000	93 %
		149	Penyusunan Verifikasi Dapodikdasmen	133.300.500,00	118.248.100	89 %
		150	Penunjang Operasional Pengawas Tingkat Satuan Pendidikan	75.336.400,00	39.596.100	53 %

		151	Workshop Operator Pendataan	36.890.000,00	22.781.000	62 %
		152	Pembuatan Buku Profil dan Profil PTK	48.754.000,00	43.770.000	90 %
		153	Program Anugrah Ki Hajar Dewantara dan Rumah Belajar	78.256.000,00	72.350.609	92 %
		154	Pengelolaan Data SIPBM	39.509.500,00	30.906.100	78 %
		155	Pengembangan IT Pendidikan Kota Bukittinggi	461.313.700,00	377.754.168	82 %
X		Progra BOS		16.232.856.710,00	14.813.806.890	91 %
		156	Kegiatan BOS	16.232.856.710,00	14.813.806.890	91 %
XI		Program Pengembangan Nilai Budaya		697.724.360,00	461.771.560,00	66 %
		157	Lomba Baca Puisi Perjuangan Tingkat Sekolah Dasar se Kota Bukittinggi	49.547.000,00	42.963.000	87 %
		158	Workshop Seni dan Budaya Bagi Guru-guru Kesenian SLTP dan SLTA se Kota Bukittinggi	51.740.200,00	48.077.400	93 %
		159	Pelaksanaan Pelatihan Nilai Tradisi Adat dan Budaya	58.172.200,00	52.722.700	91 %
		160	Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat	321.020.500,00	169.486.000	53 %
		161	Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat	73.116.500,00	23.764.000	33 %
		162	Festival Silek Tradisional	144.127.960,00	124.758.460	87 %
XII		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		536.186.750,00	411.330.501,00	77 %
		163	Penataan Koleksi Museum	35.000.000,00	4.880.000	14 %
		164	Penyediaan Database Koleksi Museum Daerah	36.996.000,00	29.684.000	80 %
		165	Registrasi Nasional Cagar Budaya Daerah	35.000.000,00	22.484.360	64 %
		166	Sosialisasi Cagar Budaya	38.635.000,00	37.625.516	97 %
		167	Pendataan Cagar Budaya	39.390.000,00	34.363.603	87 %

		168	Pendataan Kelompok Seni dan Budaya Kota Bukittinggi	9.002.000,00	8.462.000	94 %
		169	Pemeliharaan Cagar Budaya	47.479.750,00	39.336.272	83 %
		170	Konservasi Koleksi Museum	49.658.000,00	22.605.250	46 %
		171	Pemeliharaan Rumah Kelahiran Bung Hatta	49.990.000,00	44.490.000	89 %
		172	Operasional Rumah Kelahiran Bunga Hatta	145.036.000,00	125.308.000	86 %
		173	Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Kelahiran Bung Hatta	50.000.000,00	42.091.500	84 %
XIII		Program Pengelolaan Keragaman Budaya		78.710.000,00	77.881.500,00	99 %
		174	Mengikuti Event Seni dan Budaya se Sumatera Barat	78.710.000,00	77.881.500	99 %
XIV		Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		364.710.000,00	256.787.759,00	70 %
		175	Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri	100.000.000,00		0 %
		176	Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaan Dalam Negeri	127.314.000,00	120.672.400	95 %
		177	Mengikuti kegiatan BPPI (Balai Pelestarian Pusaka Indonesia) dan JKPI (Jaringan Kota Pusaka Indonesia) dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya)	137.396.000,00	136.115.359	99 %

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Capaian Kinerja

Terdapat 14 program yang memuat 177 kegiatan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPTD SKB dan sekolah negeri jenjang TK, SD, SLP . Seluruh kegiatan yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

TA 2017 sementara kegiatan yang sumber dana yang berasal dari arahan pusat seperti DAK Fisik dan Non Fisik (termasuk BOS) dilaksanakan sesuai petunjuk teknis disamping aturan lain yang relevan. Masing- masing program memiliki capaian kinerja yang berbeda satu sama lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi capaian kinerja masing-masing program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

a. *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

Pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdapat kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, dari anggaran yang tersedia sebesar Rp.1.102.938.011,- dapat direalisasikan sebesar Rp 1.014.485.524,- dan sisa anggaran sebesar Rp 88.452.487,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 92%. Ada 13 item kegiatan dalam program pelayanan administrasi perkantoran. Dari 13 kegiatan tidak ditemui masalah dan hambatan yang berarti.

b. *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdapat 3 kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 111.000.000,- Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 110.374.900,- sisa anggaran sebesar Rp 625.100,- dengan capaian persentase 99%.

c. *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat 3 item kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 284.257.110,- terealisasi Rp. 251.189.010,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 33.068.100,- dan persentase realisasi sebesar 88%.

d. *Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan*

Capaian Kinerja dan keuangan

Pada program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan terdapat 7 item kegiatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.128.360,- terealisasi Rp. 45.039.200,- dengan sisa anggaran sebesar Rp 8.089.160,- dan persentase realisasi sebesar 85%.

e. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Terdapat 12 kegiatan dalam program pendidikan anak usia dini. Dari kegiatan tersebut memiliki sasaran dalam rangka mewujudkan optimalisasi menunjang proses belajar mengajar anak usia dini. Kegiatan yang tidak bisa terealisasi sesuai rencana adalah terhadap event-event yang telah diprogramkan secara rutin oleh KEMENDIKBUD dan provinsi diantaranya adalah :

1. Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN),
2. Apresiasi LKP Berprestasi

Namun capaian kinerja untuk kedua kegiatan tersebut mencapai 100% dan capaian dana kegiatan yang tidak mencapai 100% seperti Lomba Anak Usia Dini dalam Rangka Hari Anak Nasional (HAN) 93.31%, dan kegiatan Apresiasi LKP Berprestasi realisasi anggaran mencapai 68,29%. penyebabnya adalah dari beberapa cabang lomba yang diikuti semua di targetkan juara di tingkat nasional, namun kenyataannya tidak terealisasi karena prestasi hanya diraih sampai pada tingkat provinsi sehingga dana dikembalikan ke kas daerah.

Anggaran yang tersedia untuk program pendidikan anak usia dini sebesar Rp 476.838.400 ,- terealisasi Rp 457.016.564,- dengan sisa anggaran sebesar

Rp.19.821.836,- .Capaian kinerja program mencapai 96 %, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tidak ditemui masalah.

f. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun terdapat 93 item kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang tupoksi bidang pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disamping kegiatan operasional sekolah negeri jenjang SD dan SMP. Pemerintah Kota Bukittinggi menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan, alokasi anggaran untuk masing-masing SD dan SMP berbeda satu sama lain. Dalam APBD TA 2017 tersedia anggaran untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sebesar Rp 13.661.568.221,-.Terealisasi sebesar Rp. 11.107.847.800,- dan sisanya sebesar Rp. 2.553.720.421,- Capaian kinerja program 81%. Apabila dilihat dari laporan pelaksanaan kegiatan terhadap belanja pada sekolah yaitu SD dan SMP secara umum semua kegiatan yang telah direncanakan dalam DPA dapat dilaksanakan dan sisa dana adalah dari sisa belanja/efisiensi.

Dari 93 item kegiatan terdapat 1 item kegiatan yang tidak terealisasi 0% . Kegiatan tersebut adalah DAK SMP/SMPLB Tahun 2017 dengan dana sebesar Rp. 1.142.000.000,00 tidak dapat dilaksanakan karena Penempatan Pembangunan RKB tidak sesuai dengan juknis, Ruang Kelas SMP yang akan direhab harus mempunyai kerusakan diatas 30%, sedangkan SMP Kota Bukittinggi tidak ada yang memiliki kerusakan ruang kelas diatas 30% , satu kegiatan yang capaiannya 29 % yaitu DAK SD / SDLB Tahun 2017 dengan dana sebesar Rp. 678.000.000,- hanya terealisasi Rp. 199.712.000,- alasannya adalah Ruang Kelas SD yang akan direhab harus mempunyai

kerusakan diatas 30%, sedangkan SD Kota Bukittinggi tidak ada yang memiliki kerusakan ruang kelas diatas 30%.

g. Program Pendidikan Non Formal

Terdapat 11 item kegiatan yang terdapat dalam Program Pendidikan Non Formal dengan dukungan anggaran sebesar Rp 419.495.805,- dana tersebut terealisasi sebesar Rp 396.647.264,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95%. Kegiatan yang termuat dalam program non formal memuat kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar pada program paket A,B dan C, dan kegiatan apresiasi prestasi dan kreatifitas lembaga, kegiatan penunjang operasional penilik serta penunjang operasional UPTD SKB. Apresiasi LKP Berprestasi realisasi tidak mencapai 100% disebabkan jenis lomba yang awalnya direncanakan 9 menjadi 3 jenis lomba, disamping SPPD ke provinsi tidak dicairkan disebabkan tidak adanya lomba tingkat provinsi dan kemudian dana hadiah tidak dicairkan disebabkan tidak ada lomba tingkat provinsi.

Dari laporan pelaksanaan masing-masing kegiatan tidak ditemukan permasalahan. Capaian kinerja mencapai 100% dan dana yang tidak terealisasi adalah efesiensi dari pelaksanaan kegiatan sebesar Rp 22.848.541,-

h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdapat 5 item kegiatan. Target capaian program adalah terwujudnya peningkatan mutu dan tenaga kependidikan , baik pendidikan formal maupun non formal. Kegiatan pada program ini didukung anggaran sebesar Rp. 5.062.518.535,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.898.728.950,- (97%) .

Dari laporan pelaksanaan kegiatan tidak ditemukan

permasalahan yang berarti karena capaian kinerja program mencapai 100%, artinya tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan atau semua berjalan sesuai apa yang telah direncanakan sebagaimana tertuang dalam masing-masing DPA. Realisasi dana semua kegiatan diatas terdapat sisa anggaran karena efisiensi sebesar Rp 163.789.585 ,-.

i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan memiliki 9 item kegiatan dan kegiatan tersebut merupakan kegiatan penunjang seperti : penunjang operasional pengawas, pelaksanaan sertifikasi guru, pembuatan buku profil, Penunjang operasional Tim BOS dan lain-lain. Semua kegiatan menggambarkan upaya-upaya dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Disediakan anggaran sebesar Rp 1.026.862.700,- dan terealisasi sebesar Rp 846.836.427,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 82%. Dari laporan pelaksanaan kegiatan tidak ditemui permasalahan yang berarti.

j. Program BOS

Terdapat satu item kegiatan pada Program BOS atau Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Kota Bukittinggi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 16.232.856.710,- realisasi dana Bos ini Rp.14.813.806.890 , sisa dana Rp. 1.419.049.820 dengan capaian 91 %. Sejak Tahun 2017 ini dananya di kelola oleh Provinsi dan di transfer langsung ke sekolah – sekolah, Laporan Realisasi penggunaan dana di kirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar secara on line, laporan ini sudah disamakan dengan laporan aplikasi penggunaan dana di Kota Bukittinggi, sehingga capaian keuangan sudah 91 % .

k. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pada Program Pengembangan Nilai Budaya ini memiliki anggaran sebesar Rp 697.724.360,- yang merupakan anggaran kegiatan sebanyak 6 item kegiatan. Dana tersebut terealisasi sebesar Rp 461.771.560,- (66 %). Sisa anggaran Rp.235.952.800,- Ada dua kegiatan yang capaian keuangannya masih rendah yaitu kegiatan Pokja Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Budaya Masyarakat realisasimya 32,5 % karena - anggaran tidak sinkron dan honor tidak sesuai standar , dan kegiatan Penunjang Kegiatan Lembaga-Lembaga Adat dengan capaian 52 % disebabkan oleh - ada lembaga adat yang tidak melaksanakan kegiatan, ada perubahan sturktur organisasi Bidang Kebudayaan, ada lembaga adat yang tidak aktif, kegiatan lainnya persentase capaian sudah diatas 85 %.

l. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Pada Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdapat 11 item kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 536.186.750,- dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp 411.330.501 ,- dengan persentase 77 %. Sisa anggaran Rp.124.856.249,- Capaian kinerja kegiatan mencapai 100%.

m. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya hanya ada satu item kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 78.710.000,-. Terealisasi Rp.77.881.500,- dan sisa anggaran Rp. 828.500,- dengan persentase 99%. Kinerja kegiatan mencapai 100 %.

n. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terdapat 3 item kegiatan pada Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 364.710.000,- dapat terealisasi sebesar Rp 256.787.759,-

dengan persentase 70%. Ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Mengikuti Festival Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri karena tidak ada undangan mengikuti even ke luar negeri dan capaiannya 0 %

Dari segi indikator kinerja utamayang sesuai dengan Sasaran Strategis yang ada dalam renstra Disdikbud tahun 2017 ini untuk Meningkatkan kulaitas layanan pendidikan dipegaruhi oleh APM dan APK sekolah yang capaiannya sdudah melebihi target yaitu 100% untuk sasaran meningkatkan kulaitas pendidikan masih dipengaruhioleh nilai rata-rata ujian Nasional SD dan SMP yang masih agak rendah.

Sedangkan untuk perkembangan kebudayaan di kota Bukittinggi masih dalam taraf perlindungan dan pengembangan benda cagar budaya yang dilestarikan.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas instansi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan TA 2017 yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Adapun Anggaran yang dikelola tahun 2017 sebesar Rp.

148.193.958.465 ,- terealisasi sebesar Rp.135.948.083.643,- (92%) yang terdiri dari belanja tidak langsung (gaji) sebanyak Rp. 108.085.163.503,- realisasi sebesar Rp. 100.798.339.794,- (93%) sisa sebesar Rp. 7.286.823.709,- dan belanja langsung sebesar Rp. 40.108.794.962,- terealisasi sebesar Rp. 35.149.743.849,- sisa sebesar Rp. 4.959.051.113,- (88%) . Realisasi 93% tersebut disebabkan oleh target belanja DAK 100%, yang terdiri dari DAK fisik dan DAK Non Fisik serta sisa DAK 2010-2014 dan sisa DAK 2015 hanya terealisasi 55%. Program Kegiatan Bos SD dan SMP Kota Bukittinggi terealisasi Rp. 14.813.806.890,- capaian 91% . Sementara realisasi belanja langsung tanpa DAK adalah sebesar 86 %. Data tersebut menggambarkan bahwa realisasi dana DAK sangat mempengaruhi realisasi kinerja belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Secara detail rincian sebagai berikut:

- a. Belanja langsung tanpa DAK dan BOS sebesar Rp. 20.243.704.312,- Realisasi sebesar Rp. 18.345.081.639 ,- sisa sebesar Rp. 1.898.622.673,- (90,62%)
- b. Belanja langsung DAK sebesar Rp. 3.632.233.940 ,- Realisasi sebesar Rp.1.990.855.320,- sisa sebesar Rp.1.641.378.620,-(55 %)
- c. Belanja Langsung Kegiatan BOS sebesar Rp. 16.232.856.710,- Tealisasi Rp. 14.813.806.890,- Sisa sebesar Rp.1.419.049.820,- (91 %)

Belanja tersebut di atas adalah untuk menjalankan 14 program yang memuat 177 kegiatan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh bidang-bidang pada Disdikbud, UPTD SKB dan sekolah negeri jenjang SD, SLP. Seluruh kegiatan yang bersumber dari dana APBD dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2017 sementara kegiatan yang sumber dana yang berasal dari arahan pusat seperti DAK dilaksanakan sesuai petunjuk teknis disamping aturan lain yang relevan.

Dari 177 kegiatan terdapat 170 kegiatan realisasi dana mencapai 50 – 100%, dan 3 kegiatan realisasi dana 1 – 50 % sedangkan terdapat 4 kegiatan realisasi 0% , kegiatan tersebut adalah (1). Penyusunan Pelaporan Digital kegiatan memang tidak dilaksanakan karena indikatornya tidak

sesuai akan di nolkan pada perubahan tapi sudah terlambat, (2). DAK SMP/ SMPLB Tahun 2017, Penempatan Pembangunan RKB tidak sesuai dengan juknis dan Ruang Kelas SMP yang akan direhab harus mempunyai kerusakan diatas 30%, sedangkan SMP Kota Bukittinggi tidak ada yang memiliki kerusakan ruang kelas diatas 30%. (3). Mengikuti Festifal Kesenian dan Kebudayaan Luar Negeri realisasinya tidak ada karena memang kegiatan tidak dilaksanakan atau tidak ada undangan untu mengikuti kesenian keLuar Negeri. (4) Kegiatan BOS, Realisasinya sudah Rp.14.813.806.890,- sisa nya Rp. 1.419.049.820,- dan capaian 91 %.

Pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan di Kota Bukittinggi selama beberapa kurun waktu terakhir telah menggambarkan hasil yang cukup signifikan dan menggembirakan seperti prestasi akademik baik siswa maupun guru dan lain-lain walaupun disisi lain masih terdapat kekurangan.

Akhirnya, melalui LAKIP ini semoga menjadi suatu bahan masukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi dalam rangka melaporkan pelaksanaan pembangunan di seluruh sektor termasuk bidang pendidikan.

Bukittinggi, Maret 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

DrS. MELFI, M.Si
NIP. 196605061986021005